

DUNIA PENDIDIKAN : Antara Dilema dan Harapan

Zulkifli
Emyurida

Abstract: *There is no one the nations in the world to be developed without going through the process of education builder, and through the process of educational development that is an indicator of a country's quality of human resources. The more advanced educational development of a country, then the impact on the quality of human resources.*

Indonesia's efforts to become an industrial country should be followed by an increase in the quality of reliable human resources. For that educational institutions should be managed professionally to be able to produce the human resources needs and market demand.

It gives guidance to us that the development of education is part of the national development. The success of educational development will have broad impact on national development. Thus, the development of education is of national development subsystem.

Keywords: *World Education, dilemmas and expectations*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan nasional mengalami kondisi kritis, dan perlu segera untuk disembuhkan dan ditemukan obat mujarab yang dapat memberikan kekuatan dan mampu untuk bangkit kembali.

Sejarah mencatat sudah enam kali perubahan kurikulum pendidikan, dan selama ini melalui perubahan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan kalau kita mau jujur dan kondisi obyektif yang kita saksikan malahan bertambah parah.

Perubahan sistem pendidikan nasional dinegeri ini sangat dipengaruhi oleh penguasa, dan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa selama pemerintahan orde baru, system pendidikan nasional kita sangat bernuasa politis. Kurikulum pendidikan kita dijejalkan dengan berbagai kebutuhan dan tentunya akan sangat tergantung kepada penguasa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani maupun rohani.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran kepada bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan,

serta berorientasi masa depan”.

Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini menjadi maju tanpa melalui proses pembangun pendidikan, dan melalui proses pembangunan pendidikan itulah indikator kualitas SDM suatu negara. Semakin maju pembangunan pendidikan suatu negara, maka berdampak terhadap kualitas SDM.

Upaya Indonesia untuk menjadi sebuah negeri industri harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM yang handal. Untuk itu lembaga pendidikan harus dikelola secara profesional untuk dapat menghasilkan SDM sesuai kebutuhan dan permintaan pasar.

Ini memberi petunjuk kepada kita bahwa pembangunan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Jadi, pembangunan pendidikan merupakan dari subsistem pembangunan nasional.

SOLUSI DAN HARAPAN

Bila dirinci tujuan pendidikan nasional, memang demikianlah halnya yang menjadi impian kita bersama, bagaimana SDM yang berkualitas dapat kita capai, dan tentunya jalan yang harus kita lalui tidak lain melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Penataan SDM dan perencanaan yang baik adalah titik tolak pembangunan untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah harus konsisten untuk merealisasikan

anggaran pendidikan 20 % dari APBN/APBD sebagai amanat UUD 1945.

Dalam rangka menyiapkan manusia Indonesia yang ideal tersebut, khususnya dalam menghadapi tahun 2020, maka perlu dirumuskan secara jelas kompetensi lulusan yang bagaimana yang perlu dikembangkan, sehingga saatnya nanti kita benar-benar menghasilkan SDM berkualitas sebagaimana yang dicita-cita melalui amanat sistem pendidikan nasional tersebut.

Untuk mengkaji kompetensi lulusan pendidikan tersebut, maka perlu untuk diingat melalui suatu deklarasi yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan sembilan negara berpenduduk terbesar di New Delhi (UNESCO, 1995) yang memuat enam peran besar pendidikan yaitu :

1. Ikut menggalang perdamaian dan ketertiban dunia.
2. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan masyarakat
3. Pendidikan yang merata dan menyeluruh.
4. Menanamkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
5. Mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi, sehingga pendidikan perlu dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja.
6. Berorientasi pada penguasaan dan pengembangan iptek.

Berkaitan dengan deklarasi tersebut diketahui bahwa separuhnya mengisyaratkan keeratan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi sosial dan politik suatu negara, penguasaan dan pemanfaatan iptek. Dalam perkataan lain, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan peluang kerja, baik dalam jenis, bidang maupun kompetensinya.

Bila kita bandingkan dengan rumusan negara-negara maju seperti : Amerika, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang mendefinisikan tujuh kompetensi umum yang diperlukan oleh dunia kerja, dan perlu *disupply* oleh dunia pendidikan. Kompetensi pendidikan itu meliputi :

1. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi
2. Kemampuan untuk berkomunikasi (lisan dan tertulis)

3. Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan
4. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam suatu tim kerja (*team work*)
5. Kemampuan untuk mempergunakan teknik dan logika matematika
6. Kemampuan memecahkan masalah
7. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi.

Melalui pertanyaan di atas, apakah kompetensi pendidikan kita sudah memberikan dampak terhadap peluang kerja. Peluang kerja apa saja yang dapat diisi oleh lulusan pendidikan kita. mampu untuk itu perlu dilakukan penelitian.

HARAPAN GURU

Berbicara tentang guru, maka pikiran kita akan tertuju kepada suatu keluarga yang hidup dalam suasana kesedehanaan, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, selalu berada ditengah-tengah masyarakat, terdepan dalam interaksi sosial, serta penuh dengan dedikasi dan loyalitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya di dalam kehidupan sekolah guru adalah orang yang pertama dan utama di dalam membentuk intelektual dan wawasan anak didiknya, dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat di dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Pada kondisi obyektif, kehidupan guru belumlah dikatakan sejahtera, akan tetapi kita bersyukur, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh guru sebagai pengemban tugas mulia dan pengabdian sepanjang hayat tidak terlalu menuntut hidup mewah dan diistimewakan.

Akan tetapi guru menyadari bahwa memilih profesi guru merupakan pilihan batinnya, artinya siap dengan apa adanya. Bagi para guru dan kepala sekolah, peningkatan kesejahteraan tidak melulu berarti “material/ekonomi”, melainkan pula berarti “sosial dan psikologis”.

Peningkatan kesejahteraan menurut mereka perlu dilakukan melalui:

- (1) perubahan sistem insentif/tunjangan fungsional yang berkeadilan—melihat prestasi, beban tugas dan kepangkatan, hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah, karena tunjangan guru pada kondisi sekarang belum memadai, dan perlu untuk ditingkatkan,

- tentunya disesuaikan dengan kepangkatannya;
- (2) restrukturisasi sistem “kenaikan berkala” hendaknya tepat waktu, birokrasi jangan mempersulit kenaikan pangkat berkala guru,
 - (3) restrukturisasi “sistem penggajian” guru, tentunya akan memberikan angin segar bila keinginan pemerintah menyetarakan profesi guru dengan profesi dokter
 - (4) restrukturisasi sistem profesi karier (kenaikan pangkat/golongan dan jabatan) yang terbuka dan obyektif sesuai dengan kaidah-kaidah profesi, dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh guru pada kondisi kini adalah mekanisme kenaikan pangkat dari gol. IV ke atas, karena dipersyaratkan setiap guru menyusun karya ilmiah baik berbentuk gagasan maupun berdasarkan hasil penelitian. Banyak guru yang sudah melakukan hal itu, akan tetapi bila sampai ke pusat, maka selalu gagal bahkan salah benarnya karya ilmiah yang dibuat dengan susah payah diberikan solusi dan jalan keluar, sehingga mana yang salah dan perlu di perbaiki tidak dikirimkan kepada guru yang mengusulkan;
 - (5) restrukturisasi sistem promosi jabatan yang didasarkan pada norma dan etika profesi dan menekankan pada “kelayakan” dan “kepatutan”, Disinilah perlunya suatu tim independen di dalam memberikan penilaian terhadap guru atau guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Peranan komite sekolah hendaknya lebih diberdayakan, karena komite sekolah adalah mitra sejajar sekolah dan sebagai bagian dari sekolah. Tentunya hasil penilaian akan lebih obyektif dan apa yang dihasilkan mendasarkan pertimbangan berdasarkan “kelayakan” dan “kepatutan” di dalam menempatkan seseorang dalam promosi jabatan;
 - (6) peningkatan perlindungan terhadap hak dan kewajiban profesi guru. Inilah yang menjadi tuntutan guru, apalagi guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, dan berdomisili di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, mereka perlu dilindungi, sehingga tugas dan pengabdianya tidak terganggu, semua pihak baik dari aparat pemerintahan maupun keamanan ikut memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para guru;
 - (7) penciptaan hubungan yang bersifat kolegialisme yang didasarkan pada profesionalisme di antara sesama pemegang profesi guru atau berada di lingkungan pendidikan,
 - (8) ekuivalensi beban dan struktur tugas profesional guru dengan beban dan struktur administratif guru,
 - (9) penyederhanaan sistem penilaian angka kredit bagi kenaikan pangkat/jabatan guru, artinya dengan semangat otonomi daerah mekanisme penilaian kepangkatan diserahkan kepada daerah, termasuk untuk mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun golongan IVa dan itu sudah menumpuk, apalah salahnya kalau kenaikan untuk golongan berikutnya diberikan kewenangan kepada daerah, dan ini terkait dengan persyarikatan pengembangan profesi,
 - (10) dengan semangat otonomi daerah perlu restrukturisasi sistem rekrutmen dan penempatan guru diserahkan kepada daerah karena daerah yang lebih banyak tahu kondisi obyektif pendidikan di daerah,
 - (11) pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (*in-service training*), bagi guru baik lulusan SMA yang menjadi guru di SD, D-2 ke S-1, dan S-1 ke S-2, serta S-2 ke S-3
 - (12) minimalisasi dan penghentian “sistem potongan” gaji dan insentif guru lainnya. Dengan kondisi sekarang ini, jangan ada lagi penyuntatan terhadap gaji guru, dan berikan apa yang tertulis, dan jangan dipotong untuk ini dan lainnya.
- Inilah harapan-harapan para guru dan kepala sekolah sebagai pengabdian pendidikan, serta salah satu pihak yang memiliki tanggungjawab moral di dalam meningkatkan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Banyak factor penyebab merosotnya mutu pendidikan di negeri ini, sehingga negeri ini dijuluki dengan berbagai sebutan, kita baca dan dengar serta lihat di berbagai media massa, menyebutkan bahwa “pendidikan kita dijulang kehancuran, kusut masainya pendidikan kita, pendidikan kita rusak-rusak, pendidikan ibarat lingkaran setan, pendidikan ibarat benang kusut” dan banyak lagi julukan sinis ditujukan kepada pendidikan di negeri kita ini.

Apa yang disebutkan di atas, memang apa adanya, dan sejarah mencatat sudah enam kali

terjadi perubahan kurikulum pendidikan nasional. Namun, perubahan demi perubahan yang dilakukan tidak menemukan dan mendapatkan hasil maksimal seperti apa yang diharapkan, bahkan terkesan semakin jauh dari apa yang diharapkan.

Persoalan terhadap kondisi obyektif pendidikan di negeri kita hendaknya akan menjadi pemicu bagi kita, untuk menemukan solusi yang tepat, dan strategi efektif dan efisien apa yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat meningkatkan mutu pendidikan secara simultan di semua jenis dan jenjang pendidikan.

Oleh sebab itu, kondisi tersebut bukanlah untuk ditangani dan selalu menjadi keprihatinan kita. Persoalan pendidikan yang terjadi dinegeri kita ini akan menjadi persoalan bersama, dan akan menjadi tanggungjawab kita bersama pula untuk menemukan alternative pemecahannya.

Mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia sutuhnya adalah dua dimensi dan diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan secara hakiki menyangkut kehidupan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan yang berdimensi makro mencakup pemerataan pendidikan, kebijakan pendidikan dan sebagainya. Pendidikan berdimensi mikro bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia sebagai pribadi, dengan melihat semua aspek pribadi secara utuh, yaitu aspek etik-religius, mental-intelektual, fisik dan keterampilan.

Jadi, tidak ada kata lain upaya pencerdasan suatu bangsa tidak lain melalui pendidikan, dan pendidikan itu sendiri melekat pada semua manusia ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, H. 2001. *Manajemen Pendidikan*. Kencana: Jakarta.
- Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Kompas: Jakarta.
- Dede Rosyanda. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Prenada Media: Jakarta.
- HAA.Tilaar. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Grasindo: Jakarta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam konteks Otonomi Daerah*. Adicita: Yogyakarta.
- Sudarwan Danim. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Paulo Freire. 2000. *Pendidikan Sebagai proses*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.